

ABSTRAK

Proses rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tasikmalaya Selatan telah digagas sejak tahun 2009. Rencana pemekaran daerah ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat dari 10 Kecamatan calon wilayah Kabupaten Tasikmalaya selatan yang tergabung dalam Presidium Tasikmalaya Selatan. Proses politik yang terus bergulir. Melibatkan aktor-aktor lain yang terkait mengikuti peraturan yang ada sejak diberlakukannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yaitu UU No 23 tahun 2014 yang merupakan produk hukum terbaru dari UU No 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juga PP no 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang menjadi acuan dalam proses rencana pembentukan daerah otonomi baru Tasikmalaya selatan. Rencana pemekaran ini terhalang oleh moratorium pemekaran daerah yang dilakukan di Indonesia. Pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Namun ditengah evaluasi tentang pemekaran daerah di Indonesia, rencana pemekaran ini malah semakin kuat terdengar.

Penelitian ini menggunakan teori Relasi Kuasa dari Max Weber dan Michel Foucault yang mana relasi kekuasaan terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan teori pemekaran daerah untuk menjelaskan bagaimana daerah dapat menjadi daerah baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Memilih informan menggunakan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* yang di validasi menggunakan triangulasi sumber, di mana peneliti akan membandingkan dokumentasi dengan hasil wawancara.

Hasil dari penelitian ini yaitu adanya relasi kuasa dari para elit politik yang terlibat dalam upaya pemekaran Tasikmalaya Selatan sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat dan juga elit-elit politik atas ingin dibentuknya Kabupaten Tasikmalaya Selatan saling berhubungan. Hubungan yang bersifat saling menguntungkan bagi para elit politik yang terlibat dalam upaya pemekaran Tasikmalaya Selatan sehingga upaya pemekaran Tasikmalaya Selatan di ranah Kabupaten Tasikmalaya dapat diterima dan bahkan di dukung oleh berbagai pihak dan elit politik. Meskipun demikian, tidak semua pihak setuju dengan adanya pemekaran Tasikmalaya Selatan juga.

Kata Kunci : Proses Politik, Pemekaran Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi, Tasikmalaya Selatan.

ABSTRACT

Process at the establishment of a new autonomy region of South Tasikmalaya Regency has been initiated since 2009 by the community leader of 10 sub-district candidate regions of South Tasikmalaya Regency that joined in the Community called South Tasikmalaya Presidium. The political process revolves around the other actors who are related following the regulation that existed since Indonesia applied decentralization and autonomy. The regulation is UU No 23 Tahun 2014, which is the newest regulation of Region Government replaced UU Nor 32 Tahun 1999, and PP No 78 Tahun 2007 about How to Expand, Remove and Combine the Region which become reference in the process of the establishment of new autonomy region South Tasikmalaya District. This plan is hampered by the moratorium regulation for the region expansion in Indonesia. Establishment of a new autonomy region of South Tasikmalaya district has received support from many elements. But in the middle of evaluation about the expanding region in Indonesia, this issue is louder to hear.

This research using the theory of Power Relation by Max Weber and Michel Foucault they said power relations come about in the many dimensions of social community. This research also uses theory of Decentralization, autonomy region and Region Expanding Region to explain how a region can expand to be a new region. This research is using a qualitative research method that uses the interview method and documentation for collecting data. For choosing the informan, this research using Purposive Sampling and Snowball Sampling that will be validated using source triangulation where the researcher will compare the result from the interview.

The result of this research is there are a power relation in the plan of region expansion of South Tasikmalaya Regency so that the interest of the people and political elite from the plan are connected. The connection of the relation of the interest is a win-win solution for the elite who involved in the plan of region expansion South Tasikmalaya Regency at the region of Tasikmalaya Regency can be accepted by many parties and get supported by them. Nevertheless, not all sides support the plan of region expansion of South Tasikmalaya.

Keywords: Power Relation, Autonomy Region, Decentralization, South Tasikmalaya District, region expansion.